

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Efektivitas Kebijakan Relokasi Pasar Johar Kota Semarang, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **4.1.1 Efektivitas Kebijakan Relokasi Pasar Johar Kota Semarang**

Setelah proses rehabilitasi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR selesai, Pemerintah Kota Semarang menetapkan kebijakan relokasi Pasar Johar melalui Peraturan Walikota Semarang No. 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penempatan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memfasilitasi kembalinya pedagang Pasar Johar yang sebelumnya terkena dampak kebakaran agar dapat kembali beraktivitas di Pasar Johar yang telah direhabilitasi. Hasil temuan penelitian di lapangan tentang Efektivitas Kebijakan Relokasi Pasar Johar Kota Semarang dianalisis menggunakan 4 (empat) fenomena, yaitu Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, Ketepatan Lingkungan. Pelaksanaan proses relokasi Pasar Johar Kota Semarang menunjukkan bahwa belum sepenuhnya efektif, terutama pada fenomena Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, dan Ketepatan Target. Hal tersebut ditunjukkan dari:

1. Ketepatan Kebijakan

Pada fenomena ketepatan kebijakan berjalan kurang baik. Meskipun telah dibangunnya fasilitas yang lebih baik dan tertatanya kondisi pasar dengan

baik, namun tujuan utama dari kebijakan relokasi belum tercapai. Tujuan utama dari kebijakan relokasi Pasar Johar adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang dan pendapatan pemerintah kota melalui retribusi belum memberikan hasil yang diharapkan. Bangunan yang bersih dan nyaman menjadi kurang bermakna ketika peningkatan kesejahteraan pedagang masih belum terwujud.

## 2. Ketepatan Pelaksanaan

Pada fenomena ketepatan pelaksanaan berjalan kurang baik. Hal ini dilihat dari banyaknya kendala dari tahapan awal pengajuan permohonan hingga tahapan penetapan. Dimulai dari permasalahan kesulitan pedagang usia lanjut saat melakukan pendaftaran *online* di *website pendawa.semarangkota.go.id* pada tahapan pengajuan permohonan. Kemudian 60% data tidak valid pada tahapan verifikasi karena kesalahan ataupun kekurangan berkas yang diinput pedagang saat pendaftaran. Ditambah ditemukannya 109 lapak pedagang yang tidak memiliki Berita Acara Serah Terima (BAST) pada tahapan penetapan.

## 3. Ketepatan Target

Pada fenomena ketepatan target berjalan kurang baik. Hal ini ditunjukkan dari tuntutan pedagang saat audiensi dengan Dinas Perdagangan terkait adanya sejumlah pedagang yang bukan pedagang asli Pasar Johar dapat menempati lapak yang strategis dengan melakukan praktik jual beli lapak secara ilegal. Praktik jual beli lapak ini dilaporkan salah satu pedagang dengan membawa buktik kuitansi pembelian lapak melalui salah satu oknum. Selain itu,

kurangnya dukungan dan kepatuhan pedagang sebagai target kebijakan yang memilih tetap berjualan di Pasar MAJT juga menunjukkan belum terpenuhinya fenomena ketepatan target dengan baik dalam efektivitas kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang.

#### 4. Ketepatan Lingkungan

Pada fenomena ketepatan lingkungan sudah terwujud dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari keberjalanan lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Dalam lingkungan kebijakan dapat dilihat dari komitmen antar *stakeholder* pelaksana kebijakan yang tercermin dengan baik. Adanya langkah konkret seperti pemberian lapak tambahan di *Shopping Centre Johar (SCJ)* dan pembuatan nota kesepakatan saat audiensi menunjukkan adanya komitmen Dinas Perdagangan sebagai pelaksana kebijakan. Kemudian dalam lingkungan eksternal kebijakan, persepsi positif dari masyarakat dan pedagang terhadap kebijakan relokasi menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur dan kualitas pasar telah diakui dan diapresiasi oleh publik.

#### **4.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Johar Kota Semarang**

Dalam implementasi kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang ditemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan proses relokasi. Peneliti menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang dengan mengacu pada teori menurut Edwards III. Ditemukan beberapa

faktor yang menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi, sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang adalah faktor Disposisi. Hal tersebut ditunjukkan dari:

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang. Terlihat bahwa Dinas Perdagangan Kota Semarang menunjukkan upaya sistematis dan terencana dalam menjalin komunikasi serta koordinasi dengan *stakeholder* terkait. Pendekatan sosialisasi kebijakan yang efektif juga terlihat melalui keterlibatan ketua-ketua kelompok pedagang sebagai perantara sosialisasi dalam memberikan pendampingan langsung kepada anggota pedagang, sehingga informasi tersampaikan secara jelas. Faktor komunikasi ini mempengaruhi ketepatan lingkungan secara positif. Adanya komunikasi antar *stakeholder* yang terjalin dengan baik menciptakan lingkungan kebijakan yang responsif dan minim konflik.

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang. Hal ini dilihat dari SDM pelaksana kebijakan relokasi, baik di Dinas Perdagangan, maupun UPTD Pengelola Pasar Johar sudah tercukupi dengan baik. Selain itu, terkait dengan sumber daya fisik, Pasar Johar sudah terverifikasi SNI tipe 1, sehingga memiliki kelengkapan fasilitas, seperti MCK, akses difabel, CCTV, APAR, ruang

laktasi, ruang kesehatan, alat ukur ulang, bahkan pos pantau untuk pangan segar aman. Sumber daya yang tersedia dengan cukup memiliki dampak positif terhadap ketepatan lingkungan. Dengan adanya fasilitas modern yang lengkap di Pasar Johar, persepsi positif masyarakat dan pedagang terhadap kenyamanan lingkungan berbelanja di Pasar Johar meningkat.

### 3. Disposisi

Dimensi disposisi menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang. Hal ini ditunjukkan dari respon pemerintah terhadap masalah yang dihadapi pedagang cenderung lambat. Permintaan pedagang seringkali mendapat jawaban positif, namun proses penyelesaian masalah yang dilakukan memakan waktu yang lama dan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Faktor disposisi memberikan pengaruh yang negatif pada ketepatan pelaksanaan. Dalam konteks relokasi pedagang Pasar Johar, respon yang lambat dari pihak terkait dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pedagang telah menyebabkan pelaksanaan relokasi tidak berjalan dengan baik.

### 4. Struktur Birokrasi

Faktor struktur birokrasi menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi di Dinas Perdagangan Kota Semarang yang memiliki tiga sub koordinasi telah bertugas secara spesifik dalam penataan dan penetapan pasar sehingga mendukung berjalannya proses relokasi secara efektif. Kemudian setiap *stakeholder* berperan aktif dalam proses tersebut,

seperti DPRD yang turut melakukan pengawasan dan menegaskan kesepakatan untuk memberikan ultimatum kepada pedagang yang enggan pindah. Faktor struktur birokrasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ketepatan lingkungan. Sinergi antara *stakeholder* dalam pelaksanaan kebijakan membawa dampak positif pada fenomena ketepatan lingkungan. Sinergitas ini tidak hanya memperkuat koordinasi antarpihak terkait tetapi juga mendukung keselarasan dalam mencapai tujuan kebijakan yang berkelanjutan.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Efektivitas Kebijakan Relokasi Pasar Johar Kota Semarang, peneliti masih menemukan beberapa permasalahan yang sudah dijabarkan. Maka saran yang dapat penulis sampaikan agar penyelenggaraan kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang menjadi lebih baik untuk kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengatasi permasalahan pada fenomena ketepatan kebijakan dapat dilakukan dengan menyediakan acara menarik, seperti acara seni budaya atau festival kuliner untuk meningkatkan pengunjung Pasar Johar.
2. Dalam rangka mengatasi permasalahan pada fenomena ketepatan pelaksanaan dapat dilakukan penerapan sistem pelaporan dan pelacakan yang efisien terhadap setiap tuntutan masalah pedagang untuk menangani lambatnya respon pemerintah dalam mengatasi permasalahan pedagang. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran proses pelaksanaan relokasi.

3. Dalam rangka mengatasi permasalahan pada fenomena ketepatan target dapat dilakukan dengan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di Pasar Johar untuk mengatasi praktik jual beli lapak ilegal sehingga tidak terjadi kesalahan pada target kebijakan.